

Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Sustainability Report

Studi Kasus Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar di BEI

Tahun 2020-2024

Shofya Ananda Milawati ^{1*}, Pujangga Abdillah ²

shofyaananda123@gmail.com ^{1*}, pujangga.abdillah@unmer.ac.id ²

^{1*} Universitas Merdeka Malang, Indonesia

² Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Sustainability Report pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Struktur Kepemilikan sebagai variable independen diperkirakan dengan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Publik dan Kepemilikan Institutional, sedangkan untuk variabel dependen yaitu Sustainability Report. Terdapat populasi perusahaan BUMN sebanyak 26 perusahaan dan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling dengan perusahaan yang menjadi sampel ada 18 dikali 5 tahun menjadi 90. Jenis data adalah data kuantitatif dan sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R), uji ketepatan (F), uji signifikansi variabel (T). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report. Kepemilikan Asing, Pemerintah, Publik dan Institutional memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Struktur Kepemilikan, Sustainability Report.

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Semakin banyak perusahaan besar mulai menyadari bahwa berbisnis tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana kegiatan mereka mempengaruhi hidup masyarakat dan lingkungan. Belakangan ini, Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) mulai mendapat perhatian dari berbagai perusahaan, konsep ini muncul karena masyarakat semakin mengharapkan perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dan sosial di sekitarnya (Eryadi et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan informasi yang transparan mengenai bagaimana perusahaan mengelola kegiatan bisnisnya yang diungkapkan melalui Sustainability Report (Daud et al., 2023). Hal ini merupakan aksi global yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan (Atahau & Kausar, 2022).

Fakta mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan meningkat setiap tahunnya (Purnamasari et al., 2024). Pada Tahun 2023, aktivitas sejumlah perusahaan pengolahan dan penyimpanan batu bara di Marunda

Jakarta Utara, menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat sekitar, kondisi ini bahkan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan operasional tersebut (BBC News, 2023). Tidak jauh berbeda kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kota Pekanbaru yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (WIKA) dan Hutama Karya (HK) menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat, proyek yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ini justru menimbulkan keluhan dari warga sekitar, sejumlah permasalahan yang muncul antara lain pencemaran lingkungan yang membahayakan pengguna jalan, terutama mereka yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek, selain itu pelaksanaan proyek juga berdampak pada terganggunya akses usaha masyarakat sekitar, bahkan menutup jalur pemasukan bagi sebagian pelaku usaha, kondisi tersebut tidak hanya menghambat kegiatan ekonomi, tetapi juga menurunkan kenyamanan dan kualitas aktivitas warga kota Pekanbaru dalam berusaha (Siregar, 2021).

Para pemangku kepentingan menuntut transparansi perusahaan akibat meningkatnya perhatian terhadap dampak lingkungan dan skandal korporasi, sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan (Rudyanto & Siregar, 2017). Penerapan *sustainability report* menjadi salah satu upaya penting untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan, *Sustainability Report* merupakan laporan keberlanjutan yang memuat pengungkapan terkait kebijakan, metodologi, serta metric kinea non-keuangan yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, karyawan, pelanggan, hingga masyarakat (Krantz & jongker, 2023).

Kebijakan penyusunan *Sustainability Report* bagi perusahaan publik termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Indonesia (Pranesti et al., 2022). Menurut Purwanti et al., (2022) BUMN berperan penting sebagai pilar dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi Indonesia. BUMN sebagai organisasi yang sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara menjadi contoh nyata organisasi sektor publik yang mengalami tekanan terkait *Sustainability Report* (Argento et al., 2019). Perusahaan milik pemerintah (BUMN) memiliki dua tujuan untuk mencapai efisiensi kualitas, dan keuntungan seperti perusahaan lain, sekaligus menjalankan misi negara di bawah kendali pemerintah dalam keputusan strategis seperti penunjukan direksi dan arah kebijakan (Wisuttisak & Rahman, 2021).

Peran dewan komisaris dan komite audit sangat penting dalam memastikan keterbukaan informasi perusahaan, melalui pengawasan mereka, perusahaan terdorong untuk lebih transparan, termasuk dalam menyajikan laporan keberlanjutan (Putri et al., 2022). Kepemilikan saham besar oleh eksekutif, perusahaan dan pihak asing mendorong organisasi untuk lebih banyak mengungkapkan informasi dalam laporan keberlanjutan (Kholmi & Nizzam Zein Susadi, 2021). Struktur kepemilikan diduga mempengaruhi laporan keberlanjutan perusahaan karena menentukan porsi dan peran pemegang saham, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta alokasi sumber daya (Ang et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024. Variabel independen yang digunakan diantaranya adalah Kepemilikan Asing, diketahui mempunyai keputusan yang mendukung praktik pembangunan berkelanjutan (Zhang & Wu, 2024). Kepemilikan asing adalah bentuk penanaman modal yang dilakukan investor dari luar negeri. Berbagai macam bentuk, ada perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari investor asing, ada juga yang modalnya campuran antara asing dan dalam negeri. Investor asing sering di anggap membawa keunggulan tersendiri mulai dari sumber daya, efisiensi operasional, sampai praktik manajemen yang lebih maju (Putri, 2021).

Tekanan global mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan, kepemilikan asing berperan sebagai pengawas tata kelola dan pendorong penerapan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh, sehingga perusahaan ter dorong lebih transparan melalui pengungkapan sustainability report (Nuraina, 2020). Kepemilikan asing mendorong pengungkapan sustainability report untuk mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian investasi, laporan ini memberikan investor asing akses pada informasi non keuangan yang membantu menilai kinerja serta komitmen keberlanjutan perusahaan (Holly et al., 2024).

Type indikator kepemilikan yang lain yaitu, Kepemilikan Manajerial yaitu besarnya persentase nilai saham yang ada pada pihak manajemen dibagi dengan total saham yang beredar (Rivandi, 2021). Kepemilikan manajerial terjadi ketika manajer juga menjadi pemegang saham, sehingga mereka termotivasi menjaga kinerja perusahaan karena keberhasilan perusahaan berarti keberhasilan pribadi. Namun, dalam praktinya kepemilikan ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek yang merugikan perusahaan (Belay, 2022).

Selain kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah juga berperan penting dalam pengambilan keputusan dan kinerja BUMN, yang diukur dari persentase saham yang dimiliki pemerintah. Dalam BUMN pemerintah umumnya memiliki lebih dari 50 % saham sehingga memegang kendali mayoritas (Yoyo & Astrin, 2020). Sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah berperan penting dalam menentukan sumber pendanaan BUMN, menurut teori keagenan, hubungan antara pemilik dan manajemen akan lebih sehat dengan pengawasan yang optimal (Sari & Meidiaswati, 2025). Dengan kepemilikan saham besar, pemerintah beberapa sebagian pengawas utama untuk meminimalkan konflik manajemen dan meningkatkan stabilitas serta kinerja perusahaan (Lillah & Yuyetta, 2023).

Selain kepemilikan pemerintah menjadi strategi untuk meningkatkan stabilitas & mendorong kemampuan perusahaan secara berkelanjutan kepemilikan publik juga penting, dimana semakin besar porsi kepemilikan public semakin tinggi tuntutan terhadap transparansi, investor public berasal dari masyarakat umum yang membutuhkan informasi jelas, lengkap dan mudah dipahami, Kepemilikan public juga mendorong perusahaan untuk lebih akuntabel, termasuk dalam aspek social dan lingkungan, Pengungkapan sustainability report menjadi srama bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa

mereka telah menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Krisna.R.A 2025).

Tatakelola yang baik tidak hanya di lihat dari kepemilikan public tetapi kepemilikan Institutional juga berperan baik dalam pengambilan keputusan oleh investor untuk meningkatkan nilai investasi dan meraih tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Kepemilikan institutional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau organisasi bukan perorangan yang mempunyai tanggungjawab dan kepentingan terhadap pengelolaan perusahaan itu sendiri. Semakin besar porsi saham yang dipegang investor institusi, semakin kecil ruang bagi manajemen untuk bertindak oportunitis, sehingga biaya keagenan pun bisa ditekan. Dalam praktinya, kepemilikan institutional ini sering dibedakan menjadi dua bentuk yaitu administratif dan institutional (Amrilia & Dewi, 2023).

Disektor manufaktur misalnya sebagian besar saham memang dimiliki oleh investor institusi (Amrilia & Dewi, 2023). Hal ini membuat kepemilikan institutional menjadi salah satu pilar tata kelola perusahaan yang penting karena diyakini dapat menurunkan biaya keagenan. Kepemilikan institutional memberi kekuatan suara bagi pihak eksternal atau institusi tertentu untuk mendukung atau menentang kebijakan manajemen. Tujuan utamanya untuk mengendalikan perilaku oportunitis manajer, seperti melaporkan laba tidak sesuai kenyataan demi kepentingan pribadi mereka (Ali et al.,2024).

Kebaruan dari penelitian ini berfokus pada hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan asing, manajerial, pemerintah, publik, dan institusional dengan pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkuat anggapan bahwa terdapat pengaruh dari struktur kepemilikan terhadap *sustainability report*. Alasan - alasan yang sudah disampaikan mendasari penelitian ini untuk berupaya memberikan kontribusi dan mengisi kesenjangan penelitian yang ada dengan focus pada sektor BUMN di Indonesia. Dengan hal tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Sustainability Report* (Study Kasus pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI)”.

Metode Analisis

Lingkup penelitian ini adalah akuntansi keuangan yang terkait dengan *Sustainability Report* dengan fokus pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) & laporan keuangan tahunan pada perusahaan BUMN. Periode yang digunakan adalah selama 5 tahun yaitu 2020 — 2024. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Struktur Kepemilikan terhadap *Sustainability Report*. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 26 perusahaan BUMN yang tercatat pada periode 2020-2024. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Tabel 1. Kriteria pengambilan Sampel

No	Keterangan	Hasil
1	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2024.	26
2	Perusahaan BUMN Laporan Keberlanjutan & Laporan Keuangan Tahunan tidak dapat diakses secara lengkap periode 2020-2024	(2)
3	Perusahaan BUMN yang mengungkapkan laporan Keberlanjutan periode 2020-2024 yang tidak menggunakan standart GRI sebagai referensi	(1)
4	Perusahaan BUMN yang menyajikan Laporan Keuangan periode 2020-2024 namun tidak diungkapkan secara lengkap	(5)
Jumlah Perusahaan		18
Jumlah Sampel (18x5 Tahun)		90

(Sumber: Data olahan tahun 2025)

Berdasarkan kriteria pada tabel 1, maka total perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan dari total perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI dengan periode 2020-2024 sebanyak 26 perusahaan.

Tabel 2. Nama Perusahaan Sampel

No	Kode	Perusahaan
1	ADHI	PT Adhi Karya Tbk
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
3	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk
4	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Tbk
5	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk
6	BSDE	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
7	GIAA	PT Garuda Indonesia
8	JSMR	PT Jasa Marga Tbk
9	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
10	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk
11	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
12	PP PRO	PT PP Properti Tbk
13	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
14	PTPP	PT PP Tbk
15	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk
16	TLKOM	PT Telkom Indonesia Tbk
17	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk
18	WSBP	PT Waskita Beton Precast Tbk

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang didapat dari website resmi Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/id>). Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya (Ruwanti et al., 2018). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari laporan keberlanjutan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis laporan tersebut menjadi sumber informasi utama untuk menilai sejauh mana perusahaan mengungkapkan aspek keberlanjutan dalam aktivitasnya. Sebagai acuan dalam mengukur indikator keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan, penelitian ini menggunakan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Penggunaan pedoman tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengungkapan *sustainability report* dilakukan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan standart yang diakui secara nasional maupun internasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan

mengumpulkan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan BUMN yang memuat laporan keberlanjutan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif merupakan data yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik sampel yang diteliti dalam tabel yang berisikan nama variable yang diteliti, ukuran, yaitu jumlah sampel, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, serta *standart deviation*. Hasil tersebut didapatkan melalui pengolahan data yang dilakukan menggunakan aplikasi statistic SPSS.

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan manajerial	90	0,01	0,16	0,06	0,05
Kepemilikan Asing	90	0,01	0,37	0,12	0,12
Kepemilikan Pemerintah	90	0,03	0,92	0,63	0,19
Kepemilikan Publik	90	0,02	0,49	0,21	0,11
Kepemilikan Institutional	90	0,02	0,98	0,40	0,23
Sustainability Report	90	0,10	0,89	0,48	0,21
Valid N (listwise)	90				

(Sumber: Data Oalahan SPSS versi 22, Tahun 2025)

Hasil dari data tersebut menunjukkan bahwa data yang valid digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 90 data. Hasil uji statistic deskriptif dalam table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kepemilikan Manajerial

Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai minimum 0,01 dan nilai maksimum 0,16 yang berarti bahwa proporsi saham kepemilikan manajerial secara lengkap dalam sampel yang berada pada kisaran 1% hingga 16% dengan nilai rata-rata sebesar 0,06. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan BUMN yang dijadikan sampel penelitian secara rata-rata mengungkapkan sebanyak 6% di laporan keuangannya. Nilai standart deviasi sebesar 0,05 yang lebih besar dari mean yang menandakan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial bersifat tidak homogen.

Kepemilikan Asing

Variabel Kepemilikan Asing pada tabel menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 dari perusahaan KAEF dan maksimum 0,37 dari perusahaan TLKM, yang menggambarkan bahwa porsi saham yang dimiliki investor asing berada antara 1% hingga 37%, mencerminkan adanya perbedaan minat dan keterlibatan investor luar negri di tiap perusahaan. Rata rata kepemilikan asing sebesar 0,12 mengindikasikan bahwa secara umum dalam perusahaan BUMN memiliki sekitar 12% saham yang di kuasai pihak asing. Nilai standart deviasi sebesar 0,12 menunjukkan beberapa perusahaan ada yang terlibat dan tidak terlibat dengan investor asing, hal ini menunjukkan bahwa pola investasi asing

dipengaruhi oleh jenis industri, reputasi perusahaan serta peluang yang ditawarkan.

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN menunjukkan nilai minimum sebesar 0,03 pada perusahaan PGAS & PTBA dan nilai maksimum mencapai 0,92 pada perusahaan SMBR, yang menggambarkan bahwa sebagian besar perusahaan BUMN berada di bawah dominasi kepemilikan Negara Republik Indonesia, dimana pemerintah memegang antara 3% -92% saham. Dengan rata rata kepemilikan pemerintah sebesar 0,63 mengindikasikan bahwa secara umum pemerintah memiliki pengaruh yang kuat dalam struktur kepemilikan perusahaan, dengan porsi kepemilikan sekitar 63%. Standart deviasi sebesar 0,19 menunjukkan adanya variasi yang moderat antar perusahaan, yang mencerminkan perbedaan tingkat control pemerintah tergantung pada karakteristik masing masing BUMN dan kebijakan privatisasi yang diterapkan.

Kepemilikan Publik

Variabel kepemilikan publik menunjukkan nilai minimum sebesar 0,02 pada perusahaan BMRI dan maksimum sebesar 0,49 pada perusahaan PT PP, yang menggambarkan bahwa porsi saham yang dimiliki masyarakat umum berada pada kisaran 2% hingga 49% pada perusahaan BUMN, dengan rata rata nilai kepemilikan publik sebesar 0,21 yang berarti bahwa secara umum perusahaan BUMN hanya melepas sekitar 21% sahamnya kepada publik, sehingga free float yang dimiliki cenderung rendah, kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar perusahaan BUMN masih didominasi oleh pemegang saham utama, baik pemerintah, institusi maupun pemilik pengendali lainnya, dengan nilai standart deviasi sebesar 0,11 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar perusahaan, dimana terdapat perusahaan dengan kepemilikan publik yang sangat kecil, sementara sebagian lainnya juga memiliki porsi kepemilikan publik yang lebih luas.

Kepemilikan Institutional

Variabel kepemilikan institutional menunjukkan nilai minimum sebesar 0,02 pada perusahaan WIKA dan nilai maksimum mencapai 0,98 pada perusahaan PGAS, yang menggambarkan bahwa porsi saham yang dimiliki investor institusi berada antara 1% hingga 98%. Rata rata kepemilikan institutional sebesar 0,40 mengindikasikan bahwa secara umum investor institusi memegang sekitar 40% saham perusahaan, sehingga peran institusi sebagai pemilik cenderung memiliki nilai yang stabil yang dapat menunjukkan keseimbangan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam sebagian besar perusahaan. Standart deviasi sebesar 0,23 menunjukkan adanya variasi yang cukup luas antar perusahaan, mencerminkan bahwa minat dan kepercayaan investor terhadap perusahaan BUMN bergantung pada kinerja, reputasi, serta prospek perusahaan tersebut.

Sustainability Report

Variabel *Sustainability report* menunjukkan nilai minimum 0,10 pada perusahaan BSDE dan maksimum 0,89 pada perusahaan ANTM. Nilai ini menggambarkan bahwa perusahaan BUMN memiliki tingkat transparansi yang berbeda, mulai dari hanya mengungkapkan 10% hingga hampir seluruh indikator standart GRI pada laporan keberlanjutan. Nilai rata-rata sebesar 0,48 menunjukkan hasil bahwa secara umum perusahaan baru mengungkap 48% indikator yang seharusnya dilaporkan, sehingga tingkat komitmen terhadap pelaporan keberlanjutan masih berada pada kategori sedang, sementara standart deviasi sebesar 0,21 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar perusahaan, yang dapat disebabkan oleh perbedaan kesadaran perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, tuntutan industri, serta tekanan dari para pemangku kepentingan yang mempengaruhi sejauh mana perusahaan merasa perlu untuk mengungkap informasi keberlanjutan secara lebih komprehensif.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menentukan apakah data yang dikumpulkan berdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov yaitu data dengan signifikansi $>0,05$ merupakan distribusi normal, dan data dengan signifikansi $<0,05$ merupakan data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters a.b	Mean	0,000
	Std. Deviation	0,017481
	Absolute	0,075
	Positive	0,075
	Negative	-0,047
Test Statistic		0,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200c.d

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

(**Sumber:** Data Oalahan SPSS versi 22, Tahun 2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan dalam tabel diatas yang menggunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan jumlah data sebanyak 90, yang ditunjukkan dengan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih dari 0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi memiliki hubungan antar variable bebas. Model regresi dinilai baik jika antara variable independen tidak terjadi korelasi. Untuk menilai multikolinearitas ini menggunakan VIF (Variance Inflation Factor) dimana apabila $VIF > 10$ maka terjadi multikolinearitas, dan apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kepemilikan manajerial	0,771	1,297
Kepemilikan Asing	0,170	5,872
Kepemilikan Pemerintah	0,062	6,179
Kepemilikan Publik	0,348	2,876
Kepemilikan Institutional	0,072	3,923

a. Dependent Variable : Sustainability Report
(Sumber: Data Oalahan SPSS versi 22, Tahun 2025)

Berdasarkan hasil Uji multikolinearitas dari data diatas menunjukan bahwa pada tiap variable independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF < 10 . Ditunjukan dengan variable Kepemilikan Manajerial memiliki nilai VIF sebesar $1,297 < 10$, Kepemilikan Asing memiliki nilai VIF sebesar $5,872 < 10$, Kepemilikan Pemerintah memiliki nilai VIF $6,179 < 10$, Kepemilikan Publik memiliki nilai VIF $2,876 < 10$, dan kepemilikan Institutional memiliki nilai VIF $3,923 < 10$.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi timbul ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glesjer, dimana variabel dependen merupakan nilai absolut dari residual. Nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukan data tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	t	Sig.
1 (Constant)	4,296	0,000
Kepemilikan manajerial	1,287	0,202
Kepemilikan Asing	0,638	0,525
Kepemilikan Pemerintah	-1,329	0,268
Kepemilikan Publik	-1,419	0,160
Kepemilikan Institutional	-1,022	0,310

a. Dependent Variable: RES
(Sumber: Data Oalahan SPSS versi 22, Tahun 2025)

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas dari masing masing variable diatas, menunjukan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai signifikansi sebesar $0,202 > 0,05$, Kepemilikan Asing memiliki nilai signifikansi sebesar $0,525 > 0,05$, Kepemilikan Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,268 > 0,05$, Kepemilikan Publik memiliki nilai signifikansi sebesar $0,160 > 0,05$, Kepemilikan Institutional memiliki nilai signifikansi sebesar $0,310 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukan bahwa dari variable-variabel yang ada tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi $> 0,05$.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat hubungan antara nilai residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya. Uji ini penting dilakukan karena adanya autokorelasi dapat mengindikasi bahwa model regresi tidak sepenuhnya memenuhi asumsi klasik sehingga hasil estimasi dapat menjadi kurang efisien. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Durbin Waston (DW test), dimana kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Nilai $d < d_L$ atau $d > 4-d_L$, maka terjadi autokorelasi.
- Nilai $d_U < d < 4-d_U$, maka tidak terjadi autokorelasi.
- Nilai $d_L < d < d_U$ atau $4-d_U < d < 4-d_L$, maka tidak ada kesimpulan yang pasti.

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada table berikut:

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Model Summary^a

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Waston
1	0,17994	1,747

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Publik, Kepemilikan Institusional

b. Dependent Variable : Sustainability Report

(Sumber: Data Oalahan SPSS versi 22, Tahun 2025)

Hasil uji autokorelasi pada table di atas, Durbin Waston diukur dengan menggunakan distribusi nilai table Durbin Waston yang menunjukkan nilai d_U sebesar 1,775 dan nilai d_L sebesar 1,5420 sehingga nilai $(4 - d_U)$ sebesar 2,225 dan nilai $(4 - d_L)$ sebesar 2,458. Berdasarkan hasil uji pada table di atas bahwa nilai durbin waston sebesar 1,747 menunjukkan tidak adanya autokorelasi atau tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, Hal ini dikarenakan nilai durbin wastom berada di antara d_L dan d_U sehingga dapat disimpulkan hipotesis nol ditolak maka tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda, yaitu metode statistik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan dan pengaruh variable-variabel bebas terhadap variable terikat secara simultan maupun parsial. Adapun model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$SR = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Tabel 9. Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,141	0,376		-0,373	0,710
Kepemilikan manajerial	-0,065	0,431	-0,017	-0,151	0,880
Kepemilikan Asing	0,906	0,410	0,522	2,212	0,030
Kepemilikan Pemerintah	0,439	0,391	0,440	1,122	0,041
Kepemilikan Publik	0,937	0,409	0,379	2,291	0,024
Kepemilikan Institutional	0,809	0,385	0,765	2,103	0,038

a. Dependent Variable : Sustainability Report

(Sumber: Data Oalahan SPSS versi 22, Tahun 2025)

$$SR = (-0,141) + -0,065 (KM) + 0,906 (KA) + 0,439 (KP) + 0,937 (KI) + 0,809 (KI)$$

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta adalah sebesar -0,141
- Nilai koefisien regresi pada kepemilikan manajerial sebesar 0,065 dengan nilai signifikansi 0,880 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka KM tidak memiliki pengaruh terhadap SR
- Nilai koefisien regresi pada kepemilikan asing sebesar 0,906 dengan nilai signifikansi 0,030 yang berarti lebih kecil 0,05, maka KA memiliki pengaruh positif terhadap SR
- Nilai koefisien regresi pada kepemilikan pemerintah sebesar 0,439 dengan nilai signifikansi 0,041 yang berarti lebih kecil 0,05, maka KP memiliki pengaruh positif terhadap SR
- Nilai koefisien regresi pada kepemilikan publik sebesar 0,937 dengan nilai signifikansi 0,024 yang berarti lebih kecil 0,05, maka KP memiliki pengaruh positif terhadap SR
- Nilai koefisien regresi pada kepemilikan institutional sebesar 0,809 dengan nilai signifikansi 0,038 yang berarti lebih kecil 0,05, maka KI memiliki pengaruh positif terhadap SR

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Sustainability Report

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian signifikansi variabel, diketahui bahwa variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai t dengan signifikansi 0,880 yang lebih besar dari 0,05, ini berarti bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Sustainability Report, dan dengan hasil tersebut, maka H1 ditolak. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat (2022) yang dalam penelitiannya menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap Sustainability Report. dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratitarari (2024) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Sustainability Report.

Dalam hasil penelitian, bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap sustainability report dapat dijelaskan bahwa manajerial yang turut memiliki saham sering kali memiliki kepentingan pribadi yang mendorong

manajerial lebih selektif dalam menyampaikan informasi keberlanjutan kepada publik. Manajerial cenderung mempertimbangkan potensi risiko reputasi atau konsekuensi financial jika informasi tertentu menampilkan kinerja keberlanjutan perusahaan secara kurang menguntungkan. Selain itu besarnya porsi kepemilikan manajerial dibanyak perusahaan umumnya masih relatif kecil sehingga tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan pengungkapan perusahaan secara signifikan.

Kepemilikan manajerial yang relatif kecil membuat posisi manajer kurang berpengaruh dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong kebijakan pengungkapan yang lebih transparan. Kondisi ini pada pengungkapan sustainability report lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal seperti regulasi, tekanan investor institutional, atau kebijakan dewan komisaris, bukan oleh motivasi atau kepemilikan pribadi manajer.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Sustainability Report

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian signifikansi variable, diketahui bahwa variable Kepemilikan Asing memiliki nilai t dengan signifikansi 0,030 yang lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap Sustainability Report, dan dengan hasil tersebut, maka H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis kedua ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patritarari (2024) dan Utomo (2021) yang dalam penelitiannya menemukan kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Sustainability Report dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kastuti & Sebrina (2023) dan Rachmadanty & Agustina (2023), yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap Sustainability Report.

Dalam hasil penelitian, dapat dikatakan semakin kuat dorongan bagi perusahaan BUMN untuk memperluas pengungkapan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas dan keselarasan dengan praktik tata kelola korporasi global, bahwa karakteristik investor asing yang umumnya berasal dari yurisdiksi dengan standart tata kelola, transparansi, dan praktik keberlanjutan yang lebih ketat, Investor asing cenderung menuntut pengungkapan informasi non keuangan yang lebih komprehensif sebagai upaya untuk meminimalkan risiko, meningkatkan kredibilitas perusahaan, serta memastikan keberlanjutan operasi dalam jangka panjang.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif teori legitimasi, yang dimana investor asing yang berasal dari negara dengan standart tata kelola dan transparansi tinggi menuntut perusahaan untuk memberikan pengungkapan non keuangan yang lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan global, dalam kerangka teori legitimasi perusahaan perlu menunjukkan bahwa aktivitas operasionalnya selaras dengan nilai, norma dan ekspektasi masyarakat agar memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial, selain itu, keberadaan pemegang saham asing membawa pengaruh normatif berupa penerapan standart internasional seperti Standart GRI yang mendorong perusahaan untuk

meningkatkan kualitas dan kelengkapan pengungkapan laporan keberlanjutannya sebagai strategi legitimasi.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Sustainability Report

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian signifikansi variable, diketahui bahwa variable Kepemilikan Pemerintah memiliki nilai t dengan signifikansi 0,041 yang lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Sustainability Report, dan dengan hasil tersebut, maka H1 diterima. Hasil pengujian Hipotesis ketiga ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ragita (2025) yang dalam penelitiannya menemukan kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap Sustainability Report dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sustawan & Sisdyani (2022) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap Sustainability Report.

Dalam hasil penelitian, dapat dikatakan semakin besar keterlibatan pemerintah dalam struktur kepemilikan semakin kuat dorongan bagi perusahaan BUMN untuk memperluas pengungkapan Sustainability Report yang digunakan untuk menjaga legitimasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, serta menegaskan peran perusahaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, pemerintah memiliki peran strategis sebagai pemegang saham mayoritas yang berkewajiban memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Perusahaan BUMN tidak hanya mengejar profit, tetapi juga tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah mendorong perusahaan BUMN untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, serta menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah sebagai regulator berkomitmen kuat terhadap pelaporan keberlanjutan, sehingga kepemilikan pemerintah mendorong BUMN untuk meningkatkan kualitas Sustainability Report.

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Sustainability Report

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian signifikansi variable, diketahui bahwa variable Kepemilikan Publik memiliki nilai t dengan signifikansi 0,024 yang lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa Kepemilikan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Sustainability Report, dan dengan hasil tersebut, maka H1 diterima. Hasil pengujian Hipotesis keempat ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratiwi (2025) yang dalam penelitiannya menemukan kepemilikan Publik berpengaruh terhadap Sustainability Report dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisna, R. A. (2025) dan Mediaty, M., & Pratiwi, N. (2023) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap Sustainability Report.

Dalam hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham publik, semakin tinggi tingkat pengungkapan sustainability

report perusahaan, Pemegang saham publik umumnya berperan sebagai pihak yang memonitor kinerja perusahaan, sehingga kemampuan mereka dalam mengawasi tindakan manajemen mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keberlanjutan. Dengan tingginya kepemilikan publik mencerminkan keberlanjutan operasional dan kemampuan perusahaan dalam memberikan dividen secara konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Kredibilitas tersebut menjadi pendorong bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keberlanjutan lebih terbuka demi mempertahankan kepercayaan investor. Perspektif teori stakeholder, perusahaan yang sahamnya dimiliki masyarakat luas cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas dibandingkan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih tertutup. Kepemilikan publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan transparansi sustainability report sebagai wujud akuntabilitas kepada para stakeholder.

Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Sustainability Report

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan melakukan pengujian signifikansi variabel, diketahui bahwa variabel Kepemilikan Institutional memiliki nilai t dengan signifikansi 0,038 yang lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa Kepemilikan Institutional berpengaruh positif signifikan terhadap Sustainability Report, dan dengan hasil tersebut, maka H1 diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmat, (2022), Krisna, R.A. (2025) dan Utomo (2021) yang dalam penelitiannya menemukan kepemilikan Institutional berpengaruh terhadap Sustainability Report dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin et al (2023) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap Sustainability Report.

Dalam hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan institutional dalam suatu perusahaan semakin luas informasi keberlanjutan yang diungkapkan, kondisi ini terjadi karena investor institutional umumnya memiliki kepemilikan dalam jumlah besar, sehingga perusahaan dituntut untuk menjaga kepercayaan mereka melalui transparansi dan pengungkapan informasi yang lebih komprehensif. Institusi sebagai investor cenderung memiliki pemahaman yang baik mengenai isu lingkungan, social, dan tata kelola, sehingga mereka mendorong perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan secara lebih luas dan bertanggungjawab, dorongan tersebut membuat perusahaan lebih proaktif dalam menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi ekspektasi para pemegang saham institutional.

Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengatahui apakah terdapat pengaruh dari Struktur Kepemilikan terhadap Sustainability Report pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2024. Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari penjelasan yang sudah disampaikan adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap sustainability report disebabkan oleh kepentingan pribadi manajer yang membuat mereka cenderung selektif dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan karena mempertimbangkan risiko reputasi dan konsekuensi finansial, porsi kepemilikan manajerial yang umumnya kecil menyebabkan pengaruh manajerial terhadap keputusan strategis dan kebijakan pengungkapan menjadi terbatas, sehingga tingkat pengungkapan sustainability report lebih ditentukan oleh faktor eksternal seperti regulasi, tekanan investor institutional dan peran dewan komisaris.
- Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap sustainability report pada perusahaan BUMN sebagai bentuk akuntabilitas dan penyesuaian dengan standart tata kelola global, Investor asing dari negara dengan transparansi tinggi menurut informasi nonkeuangannya yang lebih lengkap untuk mengurangi risiko dan memastikan keberlanjutan jangka panjang, sesuai teori legitimasi perusahaan perlu menunjukkan bahwa aktivitasnya selaras dengan nilai dan harapan publik agar tetap memperoleh legitimasi social, tekanan normatif dari investor asing melalui standart internasional seperti GRI juga mendorong perusahaan meningkatkan kualitas sustainability report untuk mempertahankan legitimasi di tingkat global.
- Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap sustainability report pada perusahaan BUMN yang mendorong perusahaan untuk memperluas pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai upaya menjaga legitimasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan menegaskan orientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai pemegang saham mayoritas dan regulator, pemerintah memastikan BUMN beroperasi secara transparan dan akuntabel serta sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Karena BUMN memiliki tanggung jawab social selain mengejar profit, pemerintah menuntut pengungkapan keberlanjutan yang lebih komprehensif sebagai bentuk akuntabilitas dan bukti keselarasan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
- Kepemilikan Publik berpengaruh signifikan terhadap sustainability report, sebagai pihak yang memantau kinerja manajemen, pemegang saham public mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan, tingginya kepemilikan publik juga mencerminkan stabilitas operasional dan kemampuan perusahaan membayar dividen, sehingga memperkuat kredibilitas dan mendorong keterbukaan informasi keberlanjutan, sesuai teori stakeholder, perusahaan dengan kepemilikan publik yang tinggi cenderung mengungkapkan aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas, oleh karena itu kepemilikan publik menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas dan transparansi sustainability report sebagai bentuk akuntabilitas kepada stakeholder.
- Kepemilikan Institutional berpengaruh terhadap sustainability report, bahwa investor institusional yang memiliki porsi saham besar menuntut transparansi tinggi unyuk menjaga kepercayaan, serta memiliki pemahaman kuat terkait isu lingkungan, social, dan tata kelola, hal ini institusi mendorong perusahaan lebih proaktif dalam menyediakan informasi keberlanjutan yang memenuhi ekspetasi para pemegang saham institutional.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk:

- Cakupan objek penelitian ditambah dengan melibatkan perusahaan non BUMN, sector industry lain atau periode penelitian yang lebih panjang agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang lebih umum dan meningkatkan validitas eksternal.
- Kualitas data ditambah untuk meningkatkan dan memanfaatkan sumber informasi tambahan seperti laporan keberlanjutan pihak ketiga untuk meminimalkan risiko ketidaklengkapan data dan memastikan akurasi pengukuran variable.
- Variable Struktur kepemilikan lebih di perluas pada penelitian selanjutnya termasuk kepemilikan keluarga, kepemilikan silang atau kepemilikan blockholder, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan mampu menggambarkan pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sustainability report secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Ali, M. J., Biswas, P. K., Chapple, L., & Kumarasinghe, S. (2024). Institutional ownership and earnings quality: Evidence from China. *Pacific-Basin finance journal*, 84, 102275.
- Amrilia, R., & Sutra Dewi, A. (2023). Dewan Direksi Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 8(1), 107–115. <https://doi.org/10.54526/jes.v8i1.135>
- Ang, R., Shao, Z., Liu, C., Yang, C., & Zheng, Q. (2022). The relationship between CSR and financial performance and the moderating effect of ownership structure: Evidence from Chinese heavily polluting listed enterprises. *Sustainable Production and Consumption*, 30, 117-129.
- Argento, D., Grossi, G., Persson, K., & Vingren, T. (2019). Sustainability disclosures of hybrid organizations: Swedish state-owned enterprises. *Meditari Accountancy Research*, 27(4), 505–533. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2018-0362>
- Atahau, A. D. R., & Kausar, M. F. (2022). Sustainability Report terhadap Nilai Perusahaan: Studi Perusahaan yang Terdaftar dalam Sustainability Report Rating. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5(2), 124–130. <https://doi.org/10.26905/afr.v5i2.7810>
- BBC News Indonesia. (2023). "Polusi udara: KLHK hentikan kegiatan empat perusahaan, warga Marunda: 'Kenapa baru sekarang?'" BBC.com <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjrz8lgynno>
- Belay, B. S. (2022). *הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים. הארץ*, 8(5.2017), 2003–2005.
- Daud, R., Meutia, I., & Yuniarti, E. (2023). Eco-Efficiency and Financial Performance: An Evidence from Indonesian Listed Company. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 12–22. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i1.21606>
- Eryadi, V., Wahyudi, I., & Jumaili, S. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Mayoritas, Kepemilikan Pemerintah, Dan Profitabilitas

- Terhadap Sustainability Reporting Assurance. Conference on Economic and Business Innovation, 1(35), 1–17.
- Holly, A., Tangke, P., Jao, R., & Tanri, E. P. (2024). Pengaruh Komite Audit Dan Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimediasi Oleh Sustainability Report. JAF- Journal of Accounting and Finance, 8(1), 12. <https://doi.org/10.25124/jaf.v8i1.7033>
- Kastuti, W., & Sebrina, N. (2023). Pengaruh Tekanan Karyawan dan Struktur Kepemilikan terhadap Kualitas Sustainability Reporting. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(4), 1382-1401.
- Kholmi, M., & Nizzam Zein Susadi, M. (2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 129–138. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2515>
- Krantz, T., & Jonker, A. (2023, December 19). What is a sustainability report ?.IBM. <https://www.ibm.com/topics/sustainability-report>
- Krisna, R. A. (2025). Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikaninstitusional, Kepemilikan Publik, Dan Kepemilikan asing Terhadap Pengungkapan Sustainability Report(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa EfekIndonesia Tahun 2022-2023).
- Lillah, M. S., & Yuyetta, E. N. A. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mediatty, M., & Pratiwi, N. (2023). The Impact of Profitability, Corporate Size, and Public Ownership on the Disclosure of Sustainability Reports Listed in Indonesia. *Formosa Journal of Science and Technology*, 2(12), 3253-3266.
- Pranesti, A., Larasati, K. S., & Widiyanti, A. (2022). Kinerja Keterlanjutan dan Nilai Perusahaan: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1624. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2622>
- Pratitarari, A. A. (2024). Pengaruh Anggota Dewan Komisaris Independen dan Struktur Kepemilikan terhadap Sustainability Report Perusahaan Sektor Energi, Transportasi, dan Industri Indonesia Tahun 2021-2022.
- Purnamasari, R., Hasanudin, A. I., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2024). Do internal control and information systems drive sustainable rural development in Indonesia? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100242. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100242>
- Purwanti, A., Harnovinsah, H., & Nugroho, L. (2022). Media of Carbon Emissions Disclosure and Return on Asset Operations in State-owned Enterprises Public Company. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(3), 418–424. <https://doi.org/10.32479/ijep.13012>
- Putri, D. A. I. (2021). Market Value Added (MVA) on stock return market value added (mva) dalam pengembalian saham. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 267-275.
- Rahmat, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Implementasi Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 7(2), 222–236. <https://doi.org/10.35706/acc.v7i2.7223>

- Rivandi, M. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 21–40.
<https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6439>
- Rudyanto, A., & Siregar, S. V. (2017). International Journal of Ethics and Systems.
- Siregar, Wahyudi Aulia. (2021). "Pemerintah Didesak Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari". *Okezone.com*
<https://economy.okezone.com/read/2012/11/15/320/718695/pemerintah-didesak-cabut-izin-pt-toba-pulp-lestari>
- Sutawan_&_Sisyani(2022),https://www.researchgate.net/publication/363049205_Koneksi_Politik_Kepemilikan_Pemerintah_dan_Pengungkapan_Sustainability_Report
- Utomo, B. S. (2021). Moderasi Kinerja Keuangan Pada Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Di Indeks Sri Kehati Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 9(2).
- Wisuttisak, P., & Rahman, N. B. A. (2021). Regulatory frameworks for reforms of state-owned enterprises in Thailand and Malaysia. In *Reforming State-Owned Enterprises in Asia: Challenges and Solutions* (pp. 41-64). Singapore: Springer Singapore.
- Yoyo, & Astrin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Di LaporanKeuangan. *Jurnal Indonesia Membangun*, 19(3), 12–22.
<https://jurnal.inaba.ac.id/>
- Zhang, J., & Wu, W. (2024). The impact of foreign ownership on corporate ESG performance. *Finance Research Letters*, 66(January), 105602
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105602>